

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

NGO sering dianggap sebagai aktor ketiga yang berpengaruh dalam hubungan internasional sebagaimana dikemukakan oleh Bob S. Hadiwinata, studi hubungan internasional saat ini menunjukkan bahwa NGO menanamkan rasa optimisme pada masyarakat biasa dan mendorong mereka yang tidak memiliki ‘suara’ untuk bertransformasi dalam sosial dan politik. (Hadiwinata, 2003) Dalam perkembangannya banyak isu yang dimainkan oleh NGO seperti pendidikan, budaya dan salah satu yang sangat penting adalah lingkungan. Saat ini isu lingkungan telah menjadi salah satu isu yang difokuskan bagi setiap negara dalam proses pembuatan kebijakan.

Munculnya isu lingkungan di level internasional dimulai saat *The United Nations Conference on the Human Environment* yang diselenggarakan di Stockholm tahun 1972. Konferensi ini merupakan wujud dari kesadaran masyarakat internasional akan pentingnya kerja sama penanganan masalah lingkungan hidup. Selain itu, konferensi ini menekankan pentingnya komitmen, pandangan dan prinsip bersama dari seluruh negara untuk melindungi dan meningkatkan kualitas lingkungan hidup manusia. Isu lingkungan merupakan isu yang multidisiplin, menyangkut politik, ekonomi, sosial, biologi maupun kehutanan. (United Nations, 1997)

Menurut Keraf (Keraf, 2010) isu lingkungan yang terjadi saat ini merupakan hasil dari perbuatan manusia baik di level nasional maupun internasional. Isu lingkungan ini mencakup kerusakan dan pencemaran di air, tanah, hutan dan lain-lain. Isu lingkungan berhubungan dengan eksploitasi sumber daya alam yang mengakibatkan tidak seimbangnya ekosistem. Dapat disimpulkan bahwa isu lingkungan merupakan isu yang mengancam keadaan lingkungan global.

Salah satu bentuk kerusakan lingkungan yang menjadi sorotan adalah deforestasi hutan. Deforestasi terjadi akibat pengalihan fungsi hutan sebagai wilayah pertambangan, permukiman penduduk dan juga alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Dampak dari deforestasi ini menyebabkan pelepasan gas rumah kaca dalam jumlah yang besar dan mengakibatkan perubahan iklim. Untuk mengurangi dampak yang terjadi akibat perubahan iklim dibutuhkan hutan yang sangat luas karena hutan menyerap karbondioksida yang bersumber dari pembakaran bahan bakar fosil. (Greenpeace Indonesia, 2008)

Pada tahun 2017, Indonesia memiliki hutan seluas 93,6 juta ha. (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018) Di sisi lain, hutan di Indonesia juga menyimpan potensi energi mikrobiologi yang sangat bermanfaat. Salah satu wilayah di Indonesia yang memiliki hutan yang luas adalah Pulau Kalimantan. Hingga tahun 2012 luas total perkebunan kelapa sawit di Kalimantan Timur sekitar dari 700.000 hektare. (Forest Warch Indonesia) Di Kalimantan Timur sendiri diyakini telah kehilangan lebih dari € 75,5 juta per tahun dalam pendapatan pajak bisnis karena penebangan ilegal dan pengolahan kayu ilegal. (Wulffraat & Greenwood, 2017)

Berdasarkan laporan tahunan *World Wide Fund for Nature* (WWF) mengenai status lingkungan di Kalimantan, sesuai dengan proyeksi yang ada di laporan tersebut jika deforestasi terus terjadi selama masa periode 2015-2020 di bawah skenario *Business As Usual* Kalimantan terancam kehilangan 6.000.000 hektare hutan lagi. Deforestasi menjadi salah satu penyebab yang menyumbang total emisi dunia dan setengah dari total emisi ini berasal dari Indonesia dan Brazil. Hingga tahun 2017 angka deforestasi dalam kawasan hutan tercatat 64,3%, angka tersebut telah mengalami penurunan dibandingkan di tahun 2014 yang mencapai 73,6%. (Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, 2018)

Selain deforestasi, kebakaran hutan juga memperburuk kondisi hutan, udara serta aktivitas di Kalimantan Timur. Pada tahun 2015 terdapat 333 titik panas di provinsi ini. (Artharini, 2015) Tidak cukup sampai disitu, 70% wilayah di Samarinda merupakan area tambang batu bara telah mencemari air hingga mengakibatkan banjir. (VOA Indonesia, 2013) Luas hutan primer di wilayah Kutai Barat telah berkurang 42% dari periode 1990-2010 yang disebabkan oleh deforestasi dan alih fungsi hutan. (World Agroforestry Center)

Kehadiran NGO dalam isu lingkungan ini mengkritisi keterlibatan negara yang hanya cenderung fokus dalam isu politik, ekonomi, dan keamanan dibandingkan dengan isu lingkungan. Seiring dengan meningkatnya populasi penduduk maka meningkat pula kebutuhan untuk pembangunan yang dilakukan dengan cara eksploitasi sumber daya alam. Jika dilihat dari data *World Conservation Strategy* 1991 terdapat ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang dalam penggunaan energi, data ini menjelaskan bahwa negara maju mengkonsumsi 80% energi komersial produksi dengan jumlah penduduk seperempat populasi dunia sedangkan tiga perempat lainnya tinggal di negara berkembang yang mengkonsumsi 20% energi komersil. (Munck, 2000)

Seperti yang diungkapkan oleh Ade (Wirasenjaya, 2018) mengenai pentingnya NGO lingkungan karena isu lingkungan memberikan ruang bagi perdebatan wacana terkait alasan ilmiah dalam menguraikan masalah konservasi, pembangunan berkelanjutan dan perubahan iklim. NGO muncul sebagai aktor dari *global civil society* karena negara dianggap tidak mampu untuk mengatasi permasalahan yang muncul akibat globalisasi.

Arne Naess dalam buku *Etika Lingkungan Hidup* menekankan bahwa yang mengakibatkan krisis ekologi saat ini adalah pola perilaku manusia dalam hal produksi dan konsumsi yang berlebihan dan tidak ramah lingkungan. (Keraf, 2010) Untuk mengatasi permasalahan ini dibutuhkan

perubahan yang fundamental dan revolusioner dimulai dari diri sendiri, lingkungan dan gaya hidup. Perubahan ini menyadarkan bahwa semua aspek ekologis memiliki ketergantungan dan keterkaitan. (Des Jardins, 1993)

Dalam hubungan internasional setiap aktor memiliki pengaruh yang sama terutama di isu lingkungan. Setiap aktor mempunyai kepentingan dan pengaruhnya masing-masing, dan di dalam isu lingkungan dibutuhkan keselarasan kerja antar aktor. (Chasek, Downie, & Brown, 1991) Menurut Lewis, saat ini NGO menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa berinteraksi di dunia internasional dan ikut berperan dalam proses perkembangannya yang kemungkinan tidak dapat dilakukan oleh sebuah negara. (Lewis, 2010)

Salah satu NGO yang mampu mempengaruhi kebijakan dari sebuah negara adalah *World Wide Fund for Nature* (WWF) yang berkomitmen untuk bekerja terkait isu kehidupan alam liar dan isu-isu lingkungan lainnya yang strategis. *World Wide Fund for Nature* (WWF) merupakan salah satu lembaga konservasi terbesar yang ada di dunia. *World Wide Fund for Nature* (WWF) sendiri mulai masuk di Indonesia pada tahun 1962 dengan proyek penelitian Badak Jawa yang berada di Ujung Kulon.

World Wide Fund for Nature (WWF) memiliki beberapa misi untuk melestarikan, merestorasi dan mengelola ekosistem serta keanekaragaman hayati secara berkeadilan. Selain itu, NGO lingkungan internasional ini bekerja sama dengan komunitas masyarakat lokal, pemerintah serta aktor lain untuk mewujudkan program-programnya yang mencakup enam ruang lingkup yakni *food, climate, fresh water, wildlife, forest, dan oceans*.

World Wide Fund for Nature (WWF) mulai bekerja sama dengan komunitas masyarakat lokal di tahun 1995. (World Wide Fund for Nature (WWF), 2012) Pada masa itu inisiatif ini muncul atas respon terhadap situasi yang ada di Taman

Nasional Ujung Kulon. Saat itu masyarakat tinggal di zona penyangga dengan ekosistem terumbu karang yang memburuk sehingga mata pencaharian masyarakat menjadi sulit. Kondisi ini mengakibatkan masyarakat ini mulai memasuki area konservasi dan merusak hutan. Bagi *World Wide Fund for Nature* (WWF) masyarakat menjadi aktor yang sangat penting dalam pembangunan berkelanjutan ini karena masyarakat yang tinggal di kawasan tersebut adalah masyarakat yang berhadapan langsung dengan kawasan konservasi dan zona penyangga tersebut sehingga apabila terjadi sesuatu di kawasan tersebut masyarakatlah yang menjadi akan menjadi korban pertama.

Pembangunan masyarakat yang berkelanjutan pertama kali dikemukakan oleh Jack Rothman di tahun 1979. Jack membagi tiga kerangka kerja untuk menjelaskan berbagai komunitas organisasi dalam praktik. (Rothman) Yang pertama *locality development model*, model praktik masyarakat ini didasari pada keyakinan bahwa untuk menghasilkan perubahan berbagai macam masyarakat harus dilibatkan dalam perencanaan, implementasi dan evaluasi. Tema-tema utama termasuk penggunaan prosedur demokratis, kerja sama sukarela, pengembangan pemimpin lokal dan tujuan pendidikan. Kedua, *social planning model* sebagai sebuah proses pemecahan masalah teknis yang rasional dan direncanakan secara sengaja berkaitan dengan masalah sosial yang substantif. Terakhir, *social action model* bagi praktisi yang mempraktikkan model ini berasumsi bahwa segmen populasi yang kurang beruntung perlu diatur untuk membuat tuntutan pada komunitas yang lebih besar untuk meningkatkan sumber daya atau meningkatkan perawatan. Tema utama dalam model ini adalah keadilan sosial, demokrasi, dan redistribusi kekuasaan, sumber daya dan pengambilan keputusan.

Seperti yang dikemukakan dalam *Brundtland Report* (World Commission on Environment and Development,

1987) definisi dari pembangunan berkelanjutan adalah sebagai berikut,

“Sustainable development is a process of change in which the exploitation of resources, the direction of investments, the orientation of technological development; and institutional change are all in harmony and enhance both current and future potential to meet human needs and aspirations.”

Dalam laporan ini dijelaskan juga pembangunan berkelanjutan terdiri atas dua konsep. Pertama, konsep kebutuhan terutama kebutuhan esensial dari masyarakat miskin yang ada di dunia menjadi prioritas utama. Kedua, konsep keterbarasan yang berdasarkan teknologi dan organisasi sosial dari lingkungan untuk memenuhi kebutuhan sekarang dan masa depan. (World Commission on Environment and Development, 1987)

Sejalan dengan pengertian diatas, Ife (Ife, 1995) menemukan prinsip-prinsip dalam pengembangan masyarakat yang pertama adalah *sustainability*. Dalam proses pengembangan ini masyarakat juga harus memperhatikan keberlangsungan aspek lingkungan dan hasil dari proses ini tidak mengakibatkan dampak buruk bagi lingkungan. Kedua, *empowerment* yang merupakan tujuan dari proses pengembangan masyarakat agar kegiatan ini dapat berkelanjutan.

Disebutkan dalam Deklarasi Rio tentang lingkungan hidup dan *Agenda 21* mengenai definisi hak dan tanggung jawab negara dengan prinsip (United Nations, 1997), *“That human beings are at the centre of concerns for sustainable development. They are entitled to a healthy and productive life in harmony with nature;”*

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian dengan judul *“Upaya World Wide Fund for Nature (WWF) sebagai NGO*

Lingkungan Internasional dalam Upaya Pengembangan *Sustainable Community Development*” menarik untuk dianalisa karena Kalimantan Timur memiliki hutan yang sangat luas namun kerusakan hutan juga terus terjadi di pulau ini, mulai dari pemburuan satwa ilegal, deforestasi, alih fungsi lahan dll. Situasi ini perlu ditangani secara tepat demi keberlangsungan keanekaragaman hayati yang ada di wilayah tersebut serta untuk membantu perekonomian masyarakat. WWF sebagai satu-satunya aktor non negara yang menginisiasi pengembangan pembangunan masyarakat yang berkelanjutan yang digunakan untuk meraih tujuan-tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya sehingga peran *World Wide Fund for Nature* (WWF) memiliki analisa khusus di penelitian ini.

B. Rumusan Masalah

Bagaimana Upaya *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai NGO Lingkungan Internasional dalam Upaya Pengembangan *Sustainable Community Development* di Indonesia?

C. Teori / Konsep

1. People Centered Development

Definisi pembangunan saat ini bukan sekedar pertumbuhan tetapi diikuti dengan perubahan yang berasal dari integrasi antara ekonomi, sosial dan politik dalam mencapai kehidupan yang lebih baik. Pembangunan harus mengutamakan masyarakat sebagai subjek untuk mengatasi permasalahan sosial yang ada juga sebagai subjek yang mengelolala segala sumber dayanya dan mengarahkan prosesnya. Solusi dari masalah ini adalah masyarakat perlu melakukan suatu tindakan yang bisa menempatkan pembangunan berbasis masyarakat serta berkolaborasi dengan instrument yang diperlukan.

Kolaborasi ini melibatkan hubungan antara para pemegang kepentingan. Substansi dari konsep ini menekankan pada inisiatif lokal dari masyarakatnya agar masyarakat dapat mengelola serta menyelesaikan isu yang muncul agar dapat

menguntungkan semua pihak. Dalam konsep ini akan dibahas lebih lanjut mengenai pemberdayaan masyarakat. Menurut Chamber (Chambers, 1995), pembangunan dengan konsep pemberdayaan masyarakat bukan sekedar tentang memenuhi kebutuhan dasar tetapi lebih mengutamakan cara alternative dari pertumbuhan ekonomi. Pemberdayaan masyarakat yang dimaksud adalah bukan pemberdayaan yang meningkatkan rasa percaya diri masyarakat dengan melibatkan nilai budaya setempat. Tujuan dari *People Centered Development* ini adalah untuk memperbaiki kualitas hidup masyarakat sedangkan tujuan objektifnya dalam strategi pembangunan adalah untuk mengurangi kemiskinan.

Berdasarkan penjelasan Korten, model pembangunan yang menggunakan pendekatan *People Centered Development* hadir menjadi alternatif untuk bisa meningkatkan hasil produksi yang mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Untuk memenuhi kebutuhan tetap harus dicapai dengan cara yang sesuai dengan asas dasar keadilan dan harus dapat dilestarikan untuk keberlangsungan hidup manusia.

Korten (Korten & Sjahrir, 1993) menjelaskan tiga poin penting yang dianggap menentukan bagi konsep *People Centered Development*, yakni:

- a. Dorongan dan *support* dalam mengembangkan usaha-usaha mandiri bagi masyarakat miskin untuk memenuhi kebutuhan mereka;
- b. Kesadaran masyarakat terkait sector modern bukanlah hanya sumber utama untuk pertumbuhan ekonomi konvensional namun ada sector tradisional yang menjadi sumber penghidupan rumah tangga;
- c. Kepentingan akan mengelola kelembagaan dalam upaya membangun potensi penerima bantuan agar bisa mengelola secara produktif dan swadaya menggunakan sumber daya lokal.

Dengan menggunakan konsep *People Centered Development*, masyarakat yang ada di Kalimantan Timur

berperan sebagai subjek yang didampingi oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperbaiki kualitas hidup masyarakat serta mengurangi kemiskinan.

2. *Green Economy*

Dalam era globalisasi saat ini perubahan iklim yang terjadi telah mempengaruhi banyak sektor. Salah satunya sektor ekonomi, perekonomian setiap negara terhubung melalui keluar dan masuknya barang, layanan, teknologi, informasi serta tenaga kerja. Keterkaitan pasar global saat ini membuat semua negara rentan terhadap efek dari perubahan iklim di mana pun itu terjadi. Seperti contohnya, bencana alam yang terjadi di sebuah negara tentu saja mempengaruhi perekonomian global.

Green Economy menawarkan solusi dalam mengatasi berbagai permasalahan seperti perubahan iklim, pangan dan krisis ekonomi. Konsep ini merupakan sebuah pendekatan pembangunan ekonomi yang tidak mengutamakan pembangunan ekonomi berbasis eksploitasi sumber daya alam dan lingkungan secara berlebihan serta untuk mengurangi kemiskinan. *Green Economy* merupakan sebuah gerakan besar dari pembangunan ekonomi yang hanya mementingkan keuntungan jangka pendek yang menimbulkan banyak masalah. Inti dari pembangunan adalah hubungan antara ekologi dan ekonomi. (Panayotou, 1993) Dalam pembangunan berkelanjutan tidak bisa dipungkiri bahwa ekonomi dan lingkungan tidak dapat dipisahkan. (Pearce, Barbier, & Markandya, 1992) *Green Economy* bukan hanya sekedar tentang nilai tukar tetapi lebih ke nilai guna.

United Nations melalui badan organisasinya *United Nations Environment Programme* merilis *Green Economy Initiative* pada tahun 2008 yang mendorong negara dan para pembuat kebijakan untuk mendukung investasi lingkungan dalam konteks pembangunan berkelanjutan. *Green Economy Initiative* muncul sebagai respon atas krisis ekonomi, program ini bertujuan untuk meningkatkan perekonomian global dan

mengakselsasikan upaya penanganan perubahan iklim, degradasi lingkungan dan kemiskinan.

United Nations Environment Programme mendefinisikan *Green Economy* sebagai (United Nations Environment Programme, 2009)

“Greening the economy refers to the process of reconfiguring businesses and infrastructure to deliver better returns on natural, human and economic capital investments, while at the same time reducing greenhouse gas emissions, extracting and using less natural resources, creating less waste and reducing social disparities.”

Seperti yang diungkapkan oleh Perman dalam buku *Ekonomi Sumber Daya Alam dan Lingkungan* (Fauzi, 2004), terdapat tiga poin mengenai alasan pembangunan ekonomi harus berkelanjutan. Pertama, berkaitan dengan alasan moral. Generasi saat ini mempunyai kewajiban moral dalam pengelolaan sumber daya alam agar dapat dinikmati juga oleh generasi selanjutnya. Kedua, mengenai alasan ekologi karena keanekaragaman hayati memiliki nilai sangat tinggi sehingga sudah seharusnya kegiatan ekonomi tidak merusak keanekaragaman hayati tersebut. Ketiga, alasan ekonomi dimana hingga saat ini masih menjadi perdebatan apakah kegiatan ekonomi saat ini sudah sesuai dengan kriteria pembangunan berkelanjutan.

Untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim, krisis ekonomi, degradasi lingkungan serta kemiskinan diperlukannya integrasi yang baik dari berbagai pihak. *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai NGO lingkungan internasional berupaya untuk mengedukasi masyarakat dalam mewujudkan pembangunan berkelanjutan berdasarkan nilai-nilai yang ada dalam konsep *Green Economy* agar mencapaitujuannya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terkait isu lingkungan serta memperkuat institusi dan komunitas lokal agar dapat mengelola sumber daya alam dan keanekaragaman hayati secara efektif dan bijak.

D. Argumen Utama

Upaya yang dilakukan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam Pengembangan *Sustainable Community Development* yaitu:

1. Dengan menggunakan perspektif *people centered development* riset ini ingin menunjukkan upaya yang dilakukan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam mengintegrasikan masyarakat sebagai subjek utama pembangunan berkelanjutan di Indonesia.
2. Dengan menggunakan perspektif *green economy* riset ini ingin menunjukkan upaya yang dilakukan *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam mengembangkan pembangunan ekonomi yang berlandaskan dengan nilai-nilai ekologis untuk pembangunan berkelanjutan di Indonesia.

E. Metode Penelitian

Menurut Michael Patton dan Michael Cohran (Patton & Cohran, 2002) penelitian kualitatif memiliki tujuan yang berkaitan dengan aspek kehidupan sosial dan menghasilkan frasa sebagai data untuk dianalisis. Sedangkan menurut Susan (Wyse, 2011), penelitian kualitatif merupakan penelitian yang condong ke eksplorasi. Penelitian ini digunakan agar dapat memahami mengenai alasan, pendapat serta motivasi yang mendasari suatu tindakan.

Metode kualitatif ini menggunakan metode pengumpulan data dengan cara pengamatan berpartisipasi dan wawancara mendalam. Laporan penelitian ini bersifat deskriptif dan naratif. Selain itu, metode ini sering menggunakan penalaran induktif karena menghasilkan proposisi teoritis dari pengamatan pengalaman yang dialami mereka. (Bryman, 2012)

Cara yang digunakan peneliti untuk mengumpulkan data kualitatif mencakup wawancara, penelitian yang berasal dari internet dan penelitian yang berdasarkan dokumen atau arsip. Dengan menggunakan metode penelitian kualitatif penulis berusaha menjelaskan upaya yang dilakukan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai NGO lingkungan internasional dalam Pengembangan *Sustainable Community Development* di Indonesia.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penelitian ini akan diuraikan dalam lima bab yaitu, **BAB I** merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, kerangka konseptual, argument utama, metode penelitian dan sistematika penulisan. Selanjutnya pada **BAB II** menjelaskan isu lingkungan dalam politik global serta aktor non negara *World Wide Fund for Nature* (WWF) sebagai organisasi internasional yang menginisiasi *Sustainable Community Development* dan pengaruh organisasi ini di Indonesia.

Pada **BAB III**. Secara garis besar, bagian ini menjelaskan *Sustainable Community Development* serta pendekatan dan program yang dilakukan oleh *World Wide Fund for Nature* (WWF) dalam menawarkan *people centered development* dan *green economy* untuk mendukung dan mengintegrasikan masyarakat sebagai subjek dalam pengembangan *Sustainable Community Development* di Indonesia.

Selanjutnya di **BAB IV** sebagai penutup berisi kesimpulan dari penelitian yang ditulis.

